

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga sering disebut sebagai negara agraris yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha agribisnis di tengah era globalisasi. Usaha ini diharapkan mampu memberi dampak positif yang lebih besar terhadap sektor pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian. Salah satu point dalam “*triple track strategy*” menyebutkan kebutuhan untuk merevitalisasi pertanian sebagai upaya untuk membangun pertanian Indonesia dari sederhana menjadi pertanian berbasis agribisnis.(ntb.litbang.pertanian.go.id)

Sektor pertanian di Indonesia dibagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor pertanian pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Sektor pertanian terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam menuju swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, seta pendorong bergeraknya sektor-

sektor ekonomi lainnya. Lingkungan yang lebih sempit pembangunan-pengembangan sektor tanaman pangan terutama padi masih menjadi prioritas utama kebijakan pertanian bagi sebagian besar negara di dunia, karena beras merupakan pangan utama hampir 50% penduduk dunia dan 90% penduduk Asia. Di Indonesia, produksi padi memiliki posisi penting dalam sistem pangan karena beras merupakan pangan utama masyarakat Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2011 konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 139 kg/kapita lebih tinggi dari Thailand dan Malaysia yang hanya 65-70 kg/kapita pertahun. Pada tahun 2013 masyarakat Indonesia 78% masih mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, beras memegang peran yang dominan yaitu sebagai makanan pokok masyarakat dan memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Peran tersebut antara lain : (a) usahatani padi menghidupi sekitar 20 juta keluarga petani dan buruh tani, serta menjadi urat nadi perekonomian pedesaan, (b) permintaan akan beras terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk karena program diversifikasi pangan belum berhasil dengan baik, (c) produksi beras di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif akibat bencana alam, perubahan iklim, serangan hama penyakit dan kenaikan harga beras dan input produksi dan (d) usahatani padi masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan (Suryana *et al*, 2009). Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Indonesia masih impor ke Negara lain. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut secara rinci diperjelas di tabel 1.

Tabel 1. Impor beras Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2013

Komoditas	Satuan	Impor				Total 2010-2013	Growth rate impor index (%)
		2010	2011	2012	2013		
Beras	Volume (Ton)	687,58	2.744.,26	1.927,56	472,67	5.832,08	(11,7)
	Nilai (000 US\$)	360,79	1.509,25	1.006,97	246,03	3.123,05	(11,9)

Sumber: *www.bps.go.id*

Penyebab Indonesia melakukan impor beras adalah lahan pertanian yang semakin sempit dan ketergantungan yang tinggi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi beras serta pertumbuhan penduduk semakin naik dari tahun ke tahun. Total dari tahun 2010 hingga 2013, Indonesia melakukan impor beras hingga 5.832,08 ton atau 11,7% bila dilihat indeks perkembangan impor beras Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan impor beras di Indonesia terhadap Negara lain masih tinggi. Konsumsi beras masyarakat Indonesia yang semakin tinggi tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan oleh petani, akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hampir setengah masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani. Menurut data statistik Kabupaten Bantul ada sekitar 49% atau setengah dari masyarakat Bantul menggantungkan hidupnya dari pertanian. Banyaknya masyarakat Bantul bermata pencaharian sebagai petani karena didukung dengan jumlah lahan yang luas. Terdapat 210.94 km² (41,62%) daerah datar dan landai yang merupakan daerah pertanian subur (Data Statistik Kabupaten Bantul, 2012).

Tabel 2. Luas panen, Produksi dan Produktivitas padi sawah Kabupaten Bantul

Tahun	Padi sawah		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas
2009	28.258	182.843	6,470486
2010	30.560	189.883	6,213449
2011	30.559	197.618	6,466769
2012	30.064	204.959	6,817423
2013	32.621	209.149	6,411483

sumber: Data BPS Kabupaten Bantul

Dilihat dari tabel diatas, produksi padi sawah mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2009 hingga 2013. Hal ini menandakan bahwa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bantul masih mengandalkan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Sementara luas panen terjadi fluktuasi dari tahun 2009 hingga tahun 2013 artinya bahwa luas panen tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis yang tidak menentu. Di sisi lain bertumbuhnya sektor industri, jasa dan property pada era pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak buruk dan tekanan pada sektor pertanian terutama lahan sawah. Kemudian konflik penggunaan dan pemanfaatan lahan bersifat dilematis mengingat peluang perluasan areal lahan sudah sangat terbatas. Sementara tuntutan dari sektor non pertanian semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa perubahan penggunaan lahan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional tidak mungkin dapat dihindarkan. Jika dilihat dari produktivitas dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif atau produktivitas bisa dikatakan tidak stabil dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Bantul memantapkan untuk target pencapaian swasembada pangan sesuai program pemerintah Republik Indonesia.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung adanya upaya khusus pencapaian swasembada pangan tersebut dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Bentuk dukungan meliputi kebijakan yang kondusif dan pendampingan pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. (sumber: bkpp.bantulkab.go.id)

Upaya pencapaian target swasembada pangan tersebut berhadapan dengan permasalahan lahan, berkembangnya sektor non pertanian pada era pertumbuhan ekonomi telah memberikan tekanan pada sektor pertanian terutama lahan sawah. Perubahan penggunaan lahan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional tidak mungkin dapat dihindarkan, sedangkan ketersediaan lahan merupakan faktor penting untuk menjamin kelangsungan penyediaan pangan selain pemenuhan kebutuhan perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali apabila tidak ditanggulangi dapat menjadi permasalahan yang serius antara lain dapat mengancam kapasitas pangan. (Iqbal dan Sumaryanto,2007).

Tingginya alih fungsi lahan di wilayah DIY, seperti Kabupaten Bantul akan berdampak secara langsung pada sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bantul lokasinya berada dekat dengan Kota Yogyakarta. Sejalan dengan hal tersebut maka ada daya tarik untuk membangun sektor industri, jasa dan property di Kabupaten Bantul. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan budidaya pertanian yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi. Menurut data Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bantul tahun 2010 luas lahan persawahan 16.602,4557 ha sebanyak 32,76% dari total keseluruhan lahan yang berada di kawasan Kabupaten Bantul. Kecamatan yang

paling sering mengalami penyempitan lahan adalah kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Penyebabnya karena terlalu banyak usaha dari sektor non pertanian dibangun kokoh di daerah tersebut. Maka dari itu pertanian di kawasan tersebut dinamakan kawasan peri urban.

Peri urban memiliki karakteristik wilayah kekotaan yang terbangun menjadi satu dengan pemukiman kekotaan utamanya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pusat kota dan daerah kedesaannya. Ciri-ciri peri urban yaitu nyaris langkanya tempat tinggal penduduk bukan petani, mata pencaharian sudah beralih bukan mata pencaharian kedesaan seperti petani atau peternak, kemudian pemanfaatan lahan bukan untuk pertanian. Keterbatasan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan transisi dari kota ke daerah pinggiran. Hal tersebut sangat logis karena letak kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon berbatasan langsung dengan daerah Kota Yogyakarta.

Luas areal persawahan yang ada di Kabupaten Bantul adalah 2.394,2 hektar, yang merupakan jumlah dari 17 Kecamatan. Menurut data BPS Kabupaten Bantul tahun 2014 tercatat 3 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi yaitu Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan Kecamatan Sewon. Kepadatan penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk yang diperoleh dari jumlah penduduk dibagi dengan luas areal pertanian Kabupaten Bantul.

Kecamatan Kasihan mempunyai Jumlah Penduduk 119.271 (kepadatan 47 jiwa/ha), Banguntapan dengan Jumlah Penduduk 131.584 (kepadatan 65 jiwa/ ha) dan Sewon memiliki jumlah penduduk 110.355 (kepadatan 53 jiwa/ha). Hal

tersebut menandakan bahwa ketiga Kecamatan tersebut adalah wilayah yang memiliki permintaan lahan pemukiman yang relatif tinggi. Salah satu faktor peningkatan kepadatan penduduk adalah letak geografis ketiga wilayah tersebut yang terletak dekat dengan pusat perkotaan dan banyaknya lahan pertanian sehingga berpotensi terdapat alih fungsi lahan menjadi sektor non pertanian.

Luas lahan yang makin sempit tentu berdampak akan makin rendahnya produksi padi di kawasan tersebut. Hal ini mendorong petani untuk mengelola lahan secara lebih intensif dengan memanfaatkan teknologi dan faktor produksi yang dimiliki dengan harapan terjadi peningkatan produktivitas usahatani padi. Optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya adalah bagaimana menggunakan faktor produksi tersebut dengan seefisien mungkin. Suatu penggunaan faktor produksi bisa dikatakan efisien kalau nilai riil produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan. Namun demikian kondisi tersebut memberikan implikasi pada peningkatan biaya yang perlu diperhitungkan dengan keuntungan yang akan diterima.

Menurut beberapa pernyataan diatas, maka perlu diteliti mengenai seberapa besar biaya usahatani, berapa keuntungan petani serta efisiensi usahatani padi di kawasan peri urban tersebut?

B. Tujuan

1. Mengetahui besarnya keuntungan petani padi di kawasan peri urban
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di kawasan peri urban

3. Mengetahui efisiensi usahatani padi di kawasan peri urban

C. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang dilakukan di areal persawahan daerah peri urban Kabupaten Bantul:

1. Bagi petani, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien agar keuntungan yang didapatkan dapat maksimal.
2. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan terhadap dalam pembangunan pertanian khususnya dalam bidang usahatani padi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang usahatani padi di daerah peri urban.

